

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual dan beli termasuk salah satu jenis pendapatan yang jumlahnya signifikan bagi bidang keuangan di Indonesia. Kelompok usaha yang jumlahnya cukup besar dan beragam di bidang moneter di Indonesia salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kelompok UMKM Indonesia telah terbukti kuat dan mampu bertahan di tahun 1998, dimana terjadi penurunan perekonomian karena masalah keuangan negara. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, mengakibatkan banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan dan harus menghentikan para karyawannya, namun UMKM dapat terus bertahan di tengah krisis maupun setelah krisis ekonomi. Sejak saat itu, UMKM terus berperan serta dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di beberapa hal, seperti penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Yuniarta (2013), menyatakan bahwa UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki fungsi untuk mempersatukan, mengarahkan, dan mengembangkan daya kreasi, cipta, serta daya usaha rakyat, terutama bagi mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran untuk mempertinggi taraf hidup dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pada umumnya. Informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM telah menambah total *output* nasional Indonesia

(Produk Domestik Bruto) sebesar 61,41% dengan jumlah UMKM yang hampir mencapai 60 juta unit. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2019), data terakhir sementara menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, sehingga menjadikan UMKM dianggap sebagai penyokong kegiatan produksi nasional yang dapat meningkatkan pendapatan serta menjadi lapangan pekerjaan baru sehingga kesejahteraan bagi sebagian masyarakat meningkat.

Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), menunjukkan bahwa dari 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar 2,21% dalam jumlah tenaga kerja yang ada oleh keberadaan UMKM. Dimana pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja UMKM berjumlah sekitar 116 juta orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 119 orang. Melihat potensi yang cukup tinggi dengan keberadaan UMKM di Indonesia, maka para pelaku bisnis dan pemerintah perlu menciptakan strategi-strategi untuk dapat terus mengembangkan UMKM.

Perkembangan UMKM didukung oleh beberapa faktor, antara lain permodalan, tenaga kerja, dan pemasaran. Selain didukung oleh beberapa faktor tersebut, seperti yang dijelaskan (Muchid, 2015), UMKM juga menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor 1) rendahnya pendidikan, 2) kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan 3) kurangnya keandalan laporan keuangan. Sulitnya memperoleh kredit modal kerja maupun kredit investasi, menjadi salah satu faktor yang menghambat berkembangnya UMKM di Indonesia. Padahal pemerintah telah menyediakan program pembiayaan bagi UMKM salah satunya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR)

(Rudiantoro & Veronica, 2012). Penyebab sebagian besar UMKM sulit mendapat akses permodalan dari perbankan disebabkan karena sebagian besar UMKM belum dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menerapkan standar akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan entitas seperti Yuliyani *et al.* (2018); Uno dkk. (2019); Pertiwi *et al.* (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM dalam menyusun laporan keuangannya masih dilakukan secara sederhana dikarenakan ketidakpahaman mereka terkait standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang bertujuan untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan dan kinerja entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (SAK EMKM, 2016a). Selain itu, adanya laporan keuangan yang sudah tertata dengan baik, dapat menjadi dasar bagi pelaku UMKM dalam mencari keuntungan dan tambahan modal yang perlu dicapai organisasi. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang mulai berkembang untuk proses audit serta dapat digunakan sebagai syarat pengajuan kredit ke bank (Pertiwi *et al.*, 2020).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut sebagai SAK EMKM merupakan terobosan dari pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia untuk menjadi acuan bagi para pelaku bisnis dalam membuat laporan keuangannya. Didalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terdapat

beberapa komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh para pelaku bisnis, antara lain laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Apabila laporan keuangan UMKM telah disusun dengan baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), maka para pelaku bisnis dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal kerja untuk dapat mengembangkan usahanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM Guna Memperoleh Fasilitas Kredit Modal Usaha dari Bank Umum (Studi Kasus pada Klien di Kantor PP MNCa.)”**.

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi pelebaran pokok masalah yang akan dibahas, sehingga mempermudah dalam pembahasan dan dapat tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah permasalahan berfokus pada proses penyusunan laporan keuangan yang telah disusun oleh klien dari Kantor PP MNCa. periode Desember 2020 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari gambaran dasar permasalahan yang telah digambarkan oleh peneliti di atas, maka akan terbentuk permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh UMKM klien di Kantor Persekutuan Perdata MNC_o.?
2. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh UMKM klien di Kantor Persekutuan Perdata MNC_o. dengan SAK EMKM?
3. Bagaimana kegunaan laporan keuangan yang telah disusun oleh UMKM klien di Kantor Persekutuan Perdata MNC_o. terkait akses modal usaha dari perbankan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM klien di Kantor PP MNC_o.
2. Untuk mengetahui penggunaan dari laporan keuangan yang telah disusun oleh UMKM klien di Kantor PP MNC_o. guna memperoleh fasilitas kredit modal usaha dari bank.
3. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun oleh UMKM klien di Kantor PP MNC_o. telah sesuai dengan SAK EMKM atau belum.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas sehingga dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit modal usaha dari bank untuk dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian bagi Kantor Persekutuan Perdata MNC_o. diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan masukan kepada UMKM *klien*-nya dalam proses penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang disusun UMKM sesuai dengan SAK EMKM dan dapat digunakan untuk memperoleh akses modal kredit dari bank.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta pengaplikasian ilmu akuntansi yang telah didapat selama masa studi di bangku perkuliahan.